

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Pemprov Jabar Optimis Serapan Anggaran 95%
Entitas / Cakupan	: Pemprov
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal3
Edisi	: Selasa 28 Agustus 2018

Pemprov Jabar Optimistis Serapan Anggaran 95%

BANDUNG, (PR).-

Pemerintah Provinsi Jawa Barat optimistis serapan anggaran pada tahun 2018 bisa mencapai lebih dari 95 persen. Hal itu mengingat hingga 24 Agustus 2018, serapan belanja daerah Pemprov Jabar sudah mencapai 50,34% dari Rp 33,96 triliun atau Rp 17,097 triliun, meski masih didominasi belanja pegawai.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, jumlah serapan anggaran itu lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian serapan anggaran tahun lalu. Bahkan, akan semakin tinggi karena dalam waktu dekat ada alokasi anggaran yang akan segera terserap. "Sebagian besar (penggunaan anggaran) dalam proses penyelesaian konstruksi. Percepatan kami lakukan untuk realisasi anggaran. Bahkan, nanti akhir September atau awal Oktober akan ada tambahan realisasi anggaran," kata Iwa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (27/8/2018).

Menurut dia, pada akhir September atau awal Oktober akan ada di antaranya tiga item realisasi anggaran yang menyerap anggaran belanja daerah. Ketiga realisasi anggaran itu yaitu pengeluaran triwulanan. Contohnya bagi hasil pajak dan bukan pajak ke kabupaten/kota. "Itu kan dari Rp 6,7 triliun baru Rp 3,3 triliun. Nah, nanti akhir September minimal cair Rp 1,7 triliun," ujar dia.

Hal kedua, belanja bantuan keuangan. Hal itu karena di kabupaten/kota baru selesai proses lelang dan akan melanjutkan pada konstruksi hingga terjadi pencairan dana. Hal ketiga, insentif bagi seluruh pegawai Bapenda yang akan terjadi pada awal Oktober. "Kami rencanakan tahun ini minimal 95% kita dorong. Proses lelang bisa jadi kita yang tertinggi penyerapannya dan insyaallah tercapai," kata dia.

Sementara itu, Iwa juga menyoroti tiga OPD dengan serapan terendah yaitu Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (24%), Dinas Kesehatan (25%), dan Dinas Perumahan dan Permukiman (28%). Sementara tiga OPD dengan serapan tertinggi saat ini yaitu Satpol PP (71%), BPBD (69%), dan Sekretariat DPRD (66%).

Kepala Dinas Kesehatan Jabar Dodo Suhendar mengakui pihaknya memang baru mampu menyerap anggaran hingga 25% dari total anggaran yang mencapai Rp 1,2 triliun. Meskipun demikian, pihaknya optimistis pada pekan ketiga Desember realisasi anggaran dinasnya mencapai 90%.

"Anggaran tersebut untuk pembangunan fisik di Dinas Kesehatan, RSUD Al Ihsan, RSUD Jampang Kulon, Pembelian tanah di RS Kes Kerja dan di Pameungpeuk serta alat-alat kesehatan sedang proses pengerjaan, belum dibayar. Plus pembangunan tambahan di RSUD Pameungpeuk ditunda tahun depan karena masalah teknis," kata Dodo.

Sebelumnya, serapan anggaran Pemprov Jabar tahun 2017 mencapai 95,77%. Berdasarkan catatan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jabar, total volume APBD 2017 sebesar Rp 34.715.558.011.749. Dari total tersebut, dapat direalisasikan sebesar Rp 33.250.432.050.778 atau sebesar 95,77%, dan sisa anggaran sebesar Rp 1.465.125.960.971.

Realisasi anggaran itu mengalami kenaikan dibandingkan realisasi anggaran 2016 yang mencapai 93,91%. Pada penyerapan tahun lalu pun merupakan persentase tertinggi di Indonesia dari APBD 2016 yang sebesar Rp 29.896.788.807.883. Sementara APBD Jabar 2017 mengalami kenaikan Rp 4.818.769.203.866 atau sekitar 1,87 persen bila dibandingkan dengan volume APBD 2016. (Novianti Nurulliah)***